



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak

S O F I F I

LAPORAN TRIWULAN I TPID PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2026

1. Perkembangan Inflasi Daerah / Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku Utara Triwulan I

- Januari 2026

Inflasi bulan Januari 2026 menunjukkan angka 4,86 % (yoy) dari sebelumnya pada bulan Desember 2025 % 1,63 % (yoy), dan Inflasi Month to month mencapai angka 1,48 % sedangkan pada bulan desember 2025 inflasi month to month sebesar 0,05 %. Peningkatan angka inflasi pada Bulan Januari secara YOY dipengaruhi oleh Basic low effect tariff listrik yang diterapkan pemerintah, peningkatan harga emas dunia. Hal ini disebabkan juga dengan peningkatan harga Sembilan kelompok pengeluaran terutama komoditas Ikan Malalugis, Bahan Bakar Rumah Tangga, Bawang Merah Ikan Tuna dan Beras. Dan komoditas yang memeberikan andil inflasi Maluku utara (mtm) adalah Emas Perhiasan, Ikan cakalang, malalugis, tariff angkutan laut dan ikan dolosi,

Komoditas	Faktor Penyebab	Wilayah Terdampak	Urgensi
Bawang Merah	Faktor cuaca dan harga di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) mencapai Rp 100.000	Halmahera Utara	Tinggi
Cabai Rawit	Masih di atas harga acuan (Rp 61.965)	Maluku Utara (Secara umum)	Tinggi
Bawang Putih	Ketersediaan pasokan masih sangat bergantung pada kebijakan impor	Nasional (180 daerah naik)	Sedang
Minyak Goreng	Kenaikan harga 0-5% di atas harga acuan	Nasional (100 daerah naik)	Sedang
Telur Ayam Ras	Kenaikan IPH nasional mencapai 39,44% dan tren naik menjelang Ramadhan	Nasional (178 kabupaten/kota)	Sedang

- Februari 2026

Inflasi (yoy) bulan Februari 5, 85 %, dan Inflasi (mtm) 0,83 %. Kelompok penyumbang Inflasi (yoy) adalah adanya kenaikan pada kelompok pengeluaran dengan kelompok Perumahan, air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga melonjak sebesar 14,61 % dan untuk kelompok Perawatan Pribadi dan jasa

lainnya 10,28 % serta Kelompok Makanan Minuman dan Tembakau sebesar 7,86. Sejumlah komoditas perikanan seperti ikan malalugis, cakalang, tuna dan tongkol turut memberikan andil yang signifikan disamping bawang merah, minyak goreng dan daging ayam ras. Adapun yang menahan lajunya inflasi adalah cabai merah dan bawang putih (yang mengalami Deflasi)

- **Maret 2026**

Inflasi Provinsi Maluku Utara bulan Maret 2026 secara yoy sebesar 2,56 % komoditas yang mempengaruhi adalah pengaruh tarif listrik, Emas perhiasan dan bawang merah.

Perkembangan IPH sampai dengan Minggu II Maret Tahun 2026. Ada 25 Provinsi mengalami Kenaikan IPH dan 13 Provinsi yang mengalami penurunan IPH. Tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta 2,85 % dan Provinsi Maluku Utara sebesar 1,02 persen dengan posisi Sembilan Daerah yang mengalami kenaikan IPH tertinggi

Kab. Pulau Taliabu juga termasuk daerah yang mengalami kenaikan harga Telur ayam Ras dengan harga Rp. 41.550, dengan perubahan IPH 14,65 persen dan harga diatas HAP sebesar 38,50 %.

Kab. Pulau Taliabu juga termasuk daerah yang mengalami kenaikan cabai Rawit dengan harga Rp. 63.500, dengan perubahan IPH 37,03 persen dan harga diatas HAP sebesar 11,40 %. Kab. Halmahera Barat juga termasuk daerah yang mengalami kenaikan IPH Daging ayam ras dengan harga Rp. 50.000, dengan perubahan IPH 7,91 persen dan harga diatas HAP sebesar 25 %

Grafik Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku Utara TW. I Tahun 2026

Perkembangan IPH sebagai proxy Inflasi di Provinsi Maluku Utara

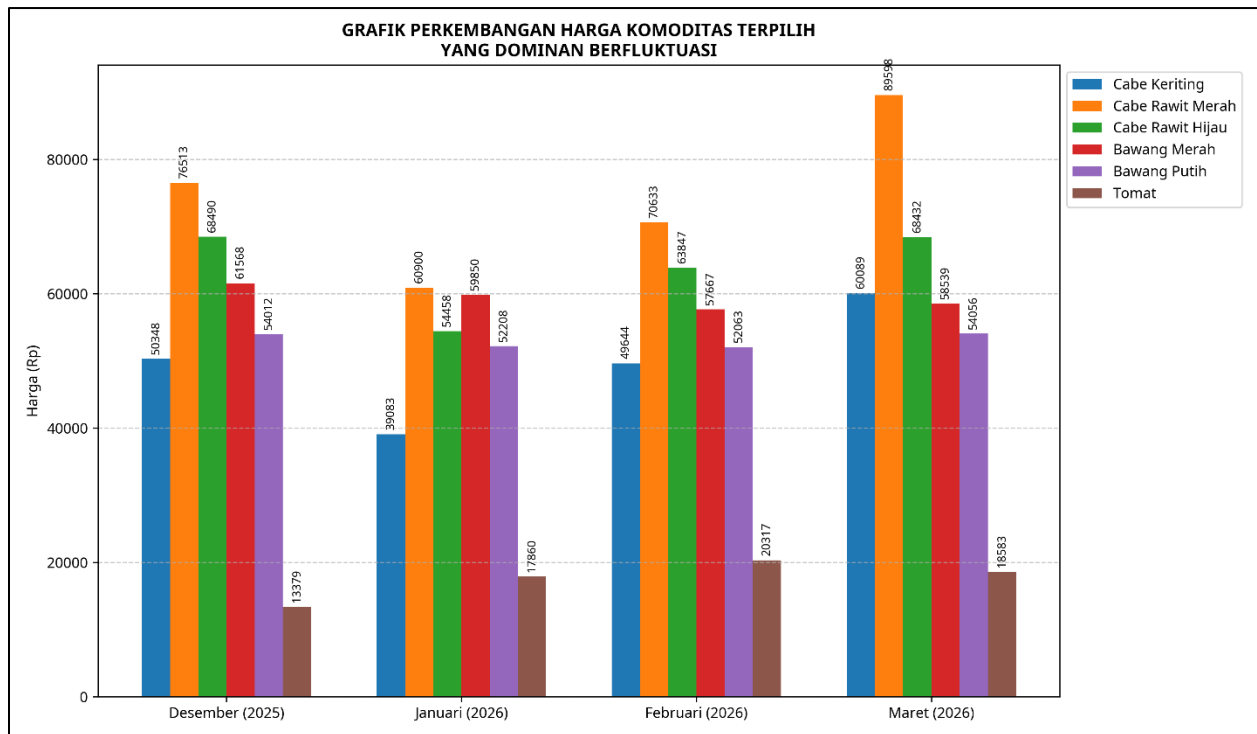
No	Komoditas Terpilih	Satuan	Harga Rata – Rata (Rp)			
			Desember (2025)	Januari (2026)	Februari (2026)	Maret (2026)
1	Telur Ayam Broiler	Kg	34.545	36.978	36.970	40.043
2	Cabe Keriting	Kg	50.348	39.083	49.644	60.089
3	Cabe Rawit merah	Kg	76.513	60.900	70.633	89.598
4	Cabe rawit Hijau	Kg	68.490	54.458	63.847	68.432
5	Cabe Merah Besar	Kg	76.513	41.200	53.567	60.089
6	Bawang Merah	Kg	61.568	59.850	57.667	58.539
7	Bawang Putih Honan	Kg	54.012	52.208	52.063	54.056
8	Beras Medium	Kg	16.485	16.305	16.355	16.380
9	Beras Premium	Kg	18.150	17.650	17.650	17.650

10	Beras SPHP	Kg	13.412	13.429	13.611	13.921
11.	Daging Ayam Ras	Kg	46.900	46.650	47.075	49.733
12	Daging Sapi Paha Depan	Kg	134.000	134.000	134.000	138.667
13	Gula Pasir kemasan	Kg	22.225	21.917	22.028	22.083
14	Minyak Grg Curah	Kg	19.800	19.688	19.688	19.125
15	Minyak Grg Kemasan	Kg	23.765	23.700	23.700	23.700
16	Tomat	Kg	13.379	17.860	20.317	18.583
17	Ikan Kembung	Kg	30.000	30.000	30.833	32.500
18	Ikan Tongkol	Kg	27.206	28.300	28.667	30.050

a.,Bulan Januari 2026 Peningkatan angka inflasi pada Bulan Januari peningkatan harga Sembilan kelompok pengeluaran terutama komoditas Daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan cabai rawit merah. Namun beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga seperti Bawang maerah, bawang putih dan kelompok ikan. Dan komoditas yang memeberikan andil inflasi Maluku utara (mtm) adalah Emas Perhiasan, Ikan cakalang, malalugis, tariff angkutan laut dan ikan dolosi serta Basic low effect tariff listrik yang diterapkan pemerintah, peningkatan harga emas dunia

b. Bulan Februari 2026 terdapat kenaikan harga : adalah adanya kenaikan pada kelompok pengeluaran terutama komoditas Daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Namun beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga seperti Bawang maerah, bawang putih dan kelompok ikan Serta beras SPHP

c. Bulan Maret 2026 beberapa komoditas yang naik antara lain : Cabai Rawit merah, cabai rawit hijau, daging ayam ras, telur ayam ras dan daging sapi. Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang HBKN Hari Raya Idul Fitri.



2. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan strategi Pengendalian Inflasi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) pada triwulan I Tahun 2026 :

a. Keterjangkauan Harga

- Fluktuasi harga pasar menjadi salah satu faktor pembentuk harga pada komoditas pangan, seperti beras, ikan segar, cabe rawit, cabe merah, bawang yang sangat dipengaruhi oleh jumlah pasokan (ketersediaan) dan permintaan masyarakat.
- Faktor cuaca yang tidak dapat diprediksi: Fenomena penghujan maupun kemarau yang melanda sebagian daerah penghasil / produsen yang menjadi pemasok kebutuhan pokok di Provinsi Maluku Utara secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap ketersediaan stok, sehingga dapat mempengaruhi kenaikan harga kelompok komoditas yang harganya bergejolak (*valotely goods*).

b. Ketersediaan Pasokan

- Gudang untuk Bahan Pangan yang belum diaktifkan baik di Provinsi Maluku Utara maupun Kota Ternate menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga barang kebutuhan khususnya komoditi yang rentan rusak seperti sayur mayur dan Bawang Cabai dan Tomat.
- Terbatasnya ketersediaan lahan pertanian menyebabkan penyediaan komoditi pangan yang masih didatangkan dari luar daerah Provinsi Maluku Utara yang sangat besar akan mempengaruhi harga barang jika stok ketersediaan tidak mencukupi kebutuhan secara menyeluruh di Provinsi Maluku Utara.
- Pola Konsumsi masyarakat yang beragam dan kurangnya sosialisasi program Diversifikasi Pangan pada masyarakat
- Pengaruh Cuaca ekstrim sangat berdampak pada ketersediaan pasokan terutama pada tanaman Holtikultura sehingga mempengaruhi pasokan

c. Kelancaran distribusi

- Cuaca yang ekstrim pada bulan TW I sangat mempengaruhi kelancaran distribusi pasokan dari luar maupun dalam daerah karena secara geografi maluku utara merupakan daerah kepulauan yang mana kebutuhan bapak masih di pasok dari luar daerah.
- Tingginya biaya transportasi mempengaruhi proses distribusi dan harga barang, terutama pada daerah yang susah dijangkau atau daerah 3 T (Tertinggal, Terjauh dan Terisolir).
- Lamanya rute Tol Laut pada beberapa daerah sehingga menyebabkan barang yang mudah rusak. Sehingga pelaku usaha lebih banyak menggunakan jalur distribusi yang lain yang menyebabkan harga pada beberapa komoditas naik.
- Kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrian yang panjang, sehingga ini menjadi kendala secara tidak langsung pada distribusi Bapak.

d. Komunikasi yang efektif

- Kurang adanya pemahaman tentang inflasi baik di lingkup SPKD maupun stakeholder terkait dan Masyarakat.
- Kurangnya akselerasi kegiatan upaya pengendalian sehingga menyebabkan ketersediaan data yang masih kurang

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka pengendalian harga barang, Tim Inflasi Pemerintah Provinsi Maluku Pada Triwulan I tahun 2026 telah melakukan beberapa kegiatan upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, diantaranya :

- a. Melakukan Rapat High Level Meeting (HLM) pada tanggal 19 Februari 2026 yang merumuskan beberapa hal terkait langkah strategis kebijakan upaya pengendalian inflasi daerah yang terintegrasi pada Kabupaten/Kota.



Rapat High Level Meeting yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara (Sherly Tjoanda) didampingi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekda Prov Maluku Utara, Kepala KPw BI Prov Maluku Utara dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Maluku Utara



HLM Provinsi di hadiri oleh Bupati/ Walikota se Provinsi Maluku Utara



HLM Provinsi di hadiri oleh Bupati/ Walikota se Provinsi Maluku Utara



Suasana Rapat HLM yang bertempat di Ballroom Hotel Bella Ternate

- b. Melaksanakan Sidak pada SPBU di Kota Ternate terkait kelangkaan BBM menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 yang

pimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Utara di dampingi oleh anggota TPID Provinsi Maluku Utara.



c. Melaksanakan Pemantauan Harga komoditas Bapak menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Distributor – Distributor besar di Kota Ternate (Kota Perhitungan Inflasi) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Utara dan beberapa pasar di Kota Tidore Kepulauan sebagai perwakilan dari daerah non inflasi yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara.



- d. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dilakukan serentak di 10 titik di 10 Kab/kota menjelang HBKN Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.
- e. Pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dilaksanakan di 4 (Empat) titik pada 4 (empat) kab/kota se Provinsi Maluku Utara
- f. Pelaksanaan Capacity Building Penyusunan Pelaporan Pengendalian Inflasi Daerah.

4. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi daerah

- a. Sampai saat ini Sebagian kebutuhan pokok Masyarakat Maluku Utara masih dipasok dari daerah (Provinsi) lain. Dengan kondisi geografis Maluku Utara yang Sebagian besar terdiri dari laut maka pada bulan – bulan tertentu akan terjadi kendala dalam masalah transportasi. Karena itu keberadaan Gudang Pasokan barang kebutuhan pokok sangat diperlukan. Disamping sebagai tempat menampung barang – barang tersebut, Gudang juga dapat sekaligus dimanfaatkan untuk menyimpan hasil produksi yang berlebih sehingga dapat dipergunakan setiap saat diperlukan.
- b. Kegiatan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD anggota TPID Provinsi Maluku Utara di beberapa lokasi cukup membantu dalam Upaya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Kegiatan semacam ini perlu terus dilakukan untuk memperkuat pasokan serta mengendalikan harga. Dan perlunya optimalisasi jumlah pelaksanaan GPM dan Pasar Murah sehingga dapat berdampak pada stabilisasi harga dan ketersediaan Bapok secara komperhensif
- c. Komunikasi dan koordinasi efektif yang terus dijalin antara OPD -OPD anggota TPID Provinsi Maluku Utara terutama dalam penyebarluasan informasi harga serta pasokanan barang kebutuhan pokok merupakan salah satu kunci dalam pengendalian inflasi daerah. Karena itu perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi salah satu Solusi dalam penanganan inflasi.

- d. Pelaksanaan Capacity Building dan KAD dimana untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi kabupaten/Kota terkait pengendalian inflasi di daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah

- a. Perlu terus didorong agar Gudang Barang Kebutuhan Pokok dapat segera dibangun dan diaktifkan pada setiap kabupaten/kota untuk memudahkan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat, khususnya pada saat bulan – bulan tertentu adanya kendala dalam transportasi dari daerah pemasok (musim ombak).
- b. Perlu adanya pengawasan terhadap distributor sehingga harga tetap stabil.
- c. Pelaksanaan KAD dengan daerah penghasil perlu ditingkatkan

Sofifi, 19 Januari 2026

**Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Maluku Utara
Sekretaris TPID**



SURIYANTO ANDILI, SE, M.Si
1976015172001121002